

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan yang besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2016).

Tentunya dalam hal ini pemerintah pusat berperan sebagai pemangku kepemimpinan Negara Indonesia, dimana pembangunan merupakan pemicu dan pemacu dari pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah dengan secara adil dan merata di berbagai wilayah Indonesia, dan yang menjadi salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional merupakan ukuran yang paling sering digunakan sebagai indikator dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan total output suatu perekonomian. Dengan melihat output tumbuh lebih cepat dari penduduk, output perkapita bertambah dan standar kehidupan meningkat (Case & Fair, 2015).

Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga hampir semua daerah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Adapun indikator pertumbuhan

ekonomi yaitu pendapatan perkapita, pendapatan nasional, kenaikan kesempatan kerja dan menurunnya tingkat kemiskinan (Suhada Deksa et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, dalam merancang pembangunan ekonomi suatu wilayah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan fisik wilayah serta interaksinya dengan wilayah lain, artinya tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku merata di seluruh daerah. Di sisi lain, salah satu faktor kunci yang menentukan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang daerah adalah pemahaman akan pentingnya teori bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan telah dirangkum pada model-model pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah (Hasan & Muhammad, 2018).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan suatu daerah dalam suatu periode tertentu yaitu dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, dimana untuk menghasilkan pendapatan masyarakat maupun nilai tambah dalam satu periode. Pertumbuhan ekonomi yang positif ditandai dengan meningkatnya kinerja perekonomian, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif ditunjukkan dengan menurunnya kinerja perekonomian dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang sedang mengembangkan sarana dan prasarana di berbagai sektor untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Setiap daerah termasuk Provinsi Jambi, mempunyai banyak permasalahan yang perlu diselesaikan. Salah satu permasalahannya adalah ada pada pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, perekonomian Provinsi Jambi mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yaitu -0,51 persen. Pandemi Covid-19 telah membuat arah dan laju pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi berubah. Dibawah ini merupakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan pada kabupaten/kota yang ada Provinsi Jambi dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2017-2023 (Persen)

Wilayah	Laju Pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi (Persen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Jambi	4,60	4,69	4,35	-0,51	3,69	5,13	4,66
Batanghari	4,81	4,83	5,07	-0,43	4,85	12,27	3,70
Bungo	5,68	4,65	4,19	-0,48	4,99	4,73	4,66
Kerinci	5,86	4,93	4,23	3,81	3,89	4,43	5,73
Merangin	5,39	4,93	4,25	0,78	5,24	5,72	5,28
Muaro Jambi	4,95	5,01	4,79	0,35	4,06	7,97	6,28
Sarolangun	4,68	4,80	4,26	-0,25	6,61	6,73	4,02
Tanjab Barat	4,48	6,77	5,01	-0,29	1,36	2,56	3,51
Tanjab Timur	3,07	2,94	4,21	-3,44	0,14	0,57	2,17
Tebo	5,58	4,98	4,76	-0,03	4,30	6,30	4,50
Kota Jambi	4,68	5,30	4,73	-4,24	4,08	5,36	6,61
Kota Sungai Penuh	6,02	4,88	5,01	-0,16	3,67	4,45	4,92

Sumber: Badan Statistik Provinsi Jambi 2024

Tabel 1.1 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2017-2023 mengalami fluktuatif. Dimana laju pertumbuhan yang paling rendah di Provinsi Jambi pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,51 persen sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang paling tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,13 persen. Dengan data ini dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sejak 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen. Sedangkan pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,34 persen, penurunan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi paling besar terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 sebanyak -4,86 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebanyak 4,2 persen dan secara beruntun laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021-2022 Provinsi Jambi terjadi kenaikan kembali yaitu 1,44 persen, sedangkan tahun 2022-2023 Provinsi Jambi pada laju pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan sebanyak -0,47 persen. Inilah yang menunjukkan bahwa yang menjadi salah satu terpenting dalam penganalisisan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah yaitu dengan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi peran pemerintah sangat penting sebagai sosok strategis untuk melakukan berbagai kebijakan melalui alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah. Terdapat dua jenis kebijakan yang dapat pemerintah lakukan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan terkait dengan hal yang akan menjadi pengaruh pada tingkatan suku bunga serta uang beredar dan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan dengan adanya pengeluaran pemerintah adalah yang disebut dengan kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah atau dalam hal ini belanja pemerintah berada di posisi yang paling strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dapat menggunakan langkah-langkah kebijakan untuk menyelamatkan situasi di mana ekonomi memburuk karena terjadinya resesi.

Salah satu indikator perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat yaitu besaran pendapatan nasional yang dapat dihitung dengan pendekatan pengeluaran atau belanja pemerintah (Rauf Dedy Abdur, 2017). Pengeluaran pemerintah merupakan indikator besarnya kegiatan pemerintah, apabila semakin banyak kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan, namun ini bukanlah berarti bahwa pengeluaran pemerintah harus selalu ditingkatkan tanpa memperhitungkan aspek efisiensinya. Dengan demikian, pemerintah perlu memprioritaskan efisiensi alokasi sumber daya di berbagai daerah sehingga mereka dapat merencanakan anggaran yang tepat dan mendorong pembangunan daerah. Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dikarenakan pengeluaran pemerintah ini akan dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah (PAD). APBD ini merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Kesia Dumais et al., 2022).

Jumlah pengeluaran pemerintah yang proporsional akan berdampak pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Lubis Effendy, 2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2016 terkait Pedoman Pengolahan

Keuangan Daerah menyatakan, klasifikasi belanja menurut bidang/fungsinya digunakan bertujuan bagi keselarasan serta keterpaduan pengelolaan keuangan negara dibagi menjadi 9 bidang, yaitu diantaranya pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

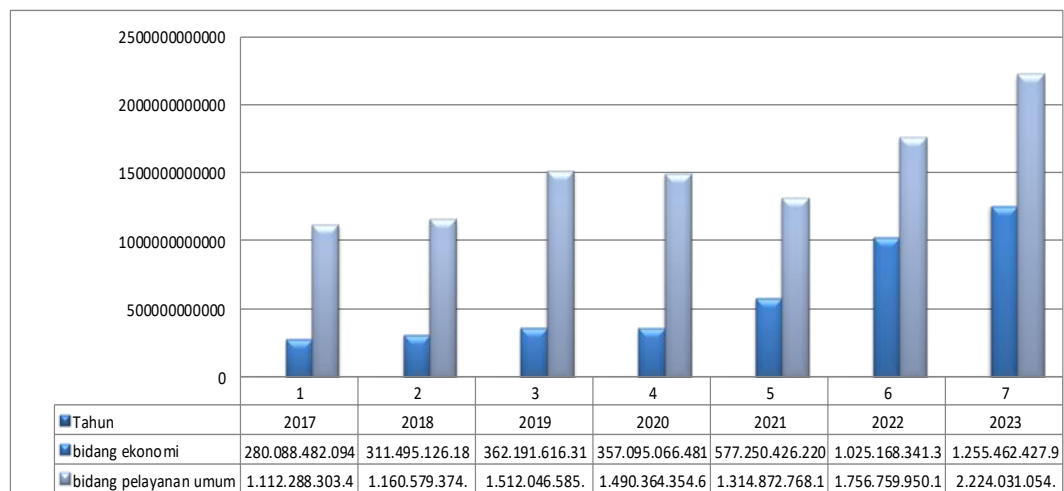
Dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi merupakan salah satunya. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan informatika, serta peningkatan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi (Yuliana et al., 2023). Sesuai dengan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.102/PMK.02/2018 yaitu belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan program yang terkait dengan perdagangan, pengembangan usaha, koperasi, dan usaha kecil dan menengah (UKM), tenaga kerja, pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, pengairan, bahan bakar dan , energi, pertambangan, industri, dan konstruksi, transportasi, telekomunikasi, dan informatika, penelitian, dan pengembangan ekonomi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah pada bidang pelayanan umum. Pengeluaran bidang pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Yayat, 2017).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga mengamanatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik, kegiatan ini harus terlaksana sesuai dengan aspirasi dan permintaan seluruh warga negara dan warga demi peningkatan pelayanan publik. Selain itu, upaya ini juga untuk menonjolkan tugas dan hak setiap warga negara serta mengakui akuntabilitas negara dan korporasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Pembatasan hukum diperlukan untuk melindungi seluruh warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan kekuasaan ketika melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.102/PMK.02/2018 yaitu tentang klasifikasi belanja pada bidang pelayanan umum yaitu lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri, bantuan luar negeri, pelayanan umum, penelitian dasar dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), utang pemerintah, pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pelayanan umum pemerintah lainnya.

Seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian, kebutuhan akan berbagai fasilitas untuk menunjang aktivitas manusia semakin meningkat. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan dalam berbagai bidang. Infrastruktur mengacu pada sistem fisik menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik yang diperlukan. Dengan cakupan pelayanan publik yang luas peran infrastruktur menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial (Ahmad et al., 2023).

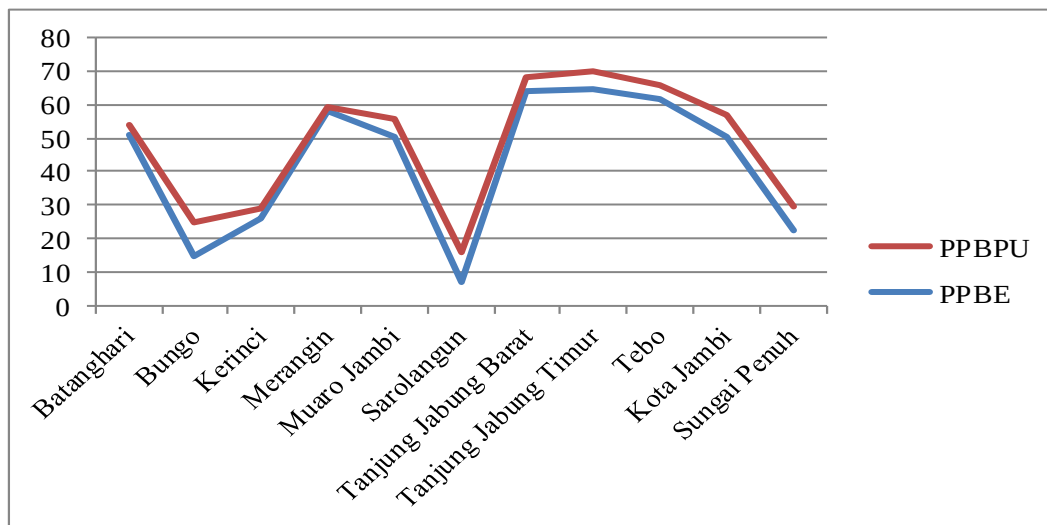
Belanja pada bidang ekonomi merupakan suatu hal yang tentunya menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan pelayanan umum diukur oleh anggaran belanja bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dialokasikan pada setiap daerah. Pada gambar 1.1 yang menunjukkan gambaran pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum Provinsi Jambi tahun 2017-2023.



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2024

Gambar 1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

Berdasarkan gambar 1 pada pengeluaran bidang ekonomi dan pelayanan umum Provinsi Jambi dengan jangka waktu selama tujuh tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya belanja bidang ekonomi Provinsi Jambi dari tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan belanjanya, namun pada tahun 2020 belanja bidang ekonomi mengalami penurunan cukup besar yaitu sebanyak 5 milyar rupiah, di tahun 2021 bidang ekonomi ini mengalami peningkatan belanja dari tahun sebelumnya yaitu meningkat sebanyak 220 milyar rupiah, selanjutnya di tahun 2022 belanja bidang ekonomi terjadi peningkatan yang paling tinggi yaitu sebanyak 467 milyar rupiah, begitu selanjutnya di tahun 2023 belanja bidang ekonomi Provinsi Jambi kembali mengalami peningkatan 230 milyar rupiah. Pada belanja bidang pelayanan umum dapat dilihat bahwasanya dari tahun 2017-2018 terjadi peningkatan sebanyak 48 milyar rupiah, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan pengeluaran pemerintah yaitu sebanyak 352 milyar rupiah. Selanjutnya tahun 2020 terjadi kembali penurunan pengeluaran sebanyak 22 milyar rupiah, begitu selanjutnya pada tahun 2021 terjadi kembali penurunan pengeluaran pemerintah yang cukup besar yaitu sebanyak 176 milyar rupiah dan pengeluaran pemerintah kembali meningkat sebanyak 468 milyar rupiah.



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2024

Gambar 2. Gambar Rata-Rata Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

Berdasarkan gambar 2 rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan pelayanan umum pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi, pada pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, daerah yang memiliki tingkat rata-rata perkembangan yang tertinggi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 64,86 persen, hal tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan yang sangat besar di tahun 2022, dimana peningkatan tersebut mencapai 463,71 persen, besarnya pengeluaran pemerintah bidang ekonomi disebabkan karena pemerintah ingin menggerakkan sektor ekonomi yang di mulai dari perdagangan, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), tenaga kerja, pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pada rata-rata pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum, daerah dengan rata-rata perkembangan tertinggi yaitu Kabupaten Bungo sebesar 10,10 persen. Besarnya rata-rata perkembangan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang besar pada bidang pelayanan umum yaitu sebesar 13,95 persen. Besarnya peningkatan tersebut digunakan pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat maupun pihak swasta melalui

lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan, fiskal serta urusan luar negeri dan pembangunan daerah.

Anggaran pada bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan dari tahun 2017-2023, yang tentunya menunjukkan situasi yang baik dari segi pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum. Dengan meningkatnya belanja pada dua bidang tersebut tidak berbanding lurus dengan atau diikuti oleh laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perekonomian semestinya terus meningkat seiring dengan peningkatan belanja atau pengeluaran pemerintah. Terutama pada tahun 2023 belanja bidang ekonomi dan pelayanan umum mengalami peningkatan yang cukup besar, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami penurunan cukup signifikan.

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan belanja pemerintah pada bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum kabupaten/kota di Provinsi Jambi yaitu, belum terserap secara merata, dan alokasi belanja serapan belanja pada bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum yang belum sesuai dan sama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya seiring dengan permasalahan yang timbul akan memperlambat perkembangan perekonomian suatu daerah yang berguna untuk tersedianya pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dengan itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan terjadinya fluktuasi pengeluaran pemerintah pada bidang pelayanan umum, dalam hal ini tentunya menggambarkan situasi mengenai pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan pelayanan umum untuk meningkatkan perekonomian. Namun, peningkatan belanja tersebut tidak berbanding lurus atau mengikuti laju pertumbuhan perekonomian daerah. Semestinya jika pengeluaran pemerintah meningkat maka terjadi pula peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tentunya

seiring dengan permasalahan yang timbul akan memperlambat perkembangan perekonomian suatu daerah yang berguna untuk tersedianya pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dengan itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah dari satu tahun tertentu di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi peran pemerintah sangat penting sebagai sosok strategis untuk melakukan kebijakan melalui alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah, khususnya pada bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum. Apabila semakin besar kegiatan pemerintah yang memprioritaskan efesiensi alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah yang tepat dalam melaksanakan roda perekonomian maka, dapat memicu laju pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah yang proporsional akan berdampak pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil kesimpulan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2017-2023?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Tahun 2017-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Tahun 2017-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan pengetahuan mengenai pengaruh terkait pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan baru kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi, khususnya pada bidang pengeluaran pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.